

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam tata kelola pemerintahan lembang, prinsip-prinsip kepemimpinan Kristen tidak sekadar menjadi wacana teologis, tetapi juga berperan sebagai landasan moral dan etika dalam memperkuat sistem pemerintahan yang berintegritas. Pemisahan yang sering kali dipaksakan antara nilai-nilai agama dan ranah pemerintahan cenderung mengabaikan aspek fundamental dari kepemimpinan Kristen yang menjunjung tinggi keadilan, kasih, dan tanggung jawab. Sebagaimana ditegaskan oleh Bonhoeffer, kepemimpinan sejati tidak hanya menuntut pemahaman mendalam atas nilai-nilai moral, tetapi juga keberanian untuk bertindak sesuai dengan kebenaran, sekalipun dihadapkan pada risiko besar.¹ Pandangan ini merefleksikan esensi kepemimpinan Kristen yang berorientasi pada pelayanan dan transformasi sosial, sebagaimana diajarkan oleh Kristus. Menurut Maxwell dalam karyanya juga menekankan bahwa kepemimpinan sejati bukanlah tentang kuasa, melainkan tentang pengaruh yang didasarkan pada integritas dan karakter yang luhur.² Dalam konteks tata kelola lembang, pengaruh ini diwujudkan melalui penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas, yang tidak hanya memastikan efisiensi

¹ Dietrich Bonhoeffer, *Ethics* (Fortress Press, 1955), 124.

² John C. Maxwell, *The 21 Irrefutable Laws of Leadership: Follow Them and People Will Follow You*. (Nashville: Thomas Nelson, 1998), 36.

dalam penggunaan anggaran, tetapi juga menciptakan kepercayaan di antara masyarakat. Pengelolaan dana lembang yang dilandasi nilai-nilai ini mampu menjadi instrumen penting dalam membangun keadilan sosial yang merata, terutama di wilayah-wilayah yang menghadapi tantangan signifikan dalam pemerataan pembangunan.

Namun, implementasi prinsip-prinsip tersebut di lapangan sering kali menemui hambatan. Salah satu masalah terbesar adalah kurangnya partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Meskipun regulasi telah mengamanatkan keterbukaan dan pelibatan publik, praktiknya masih jauh dari harapan. Forum-forum musyawarah kerap menjadi sekadar formalitas administratif tanpa melibatkan warga secara mendalam. Ketidakhadiran suara masyarakat dalam pengambilan keputusan ini tidak hanya menciptakan ketimpangan, tetapi juga berpotensi menimbulkan ketidakadilan dalam alokasi anggaran. Lebih jauh, gereja memiliki peran strategis dalam mengatasi kendala tersebut melalui pembinaan moral dan etika. Sebagai institusi yang berakar pada nilai-nilai kasih dan pelayanan, gereja dapat menjadi mitra pemerintah lembang dalam memperkuat tata kelola yang berbasis pada integritas. Gereja dapat memberikan pendidikan etis yang membangun karakter masyarakat, mendorong budaya kejujuran, serta menciptakan sinergi antara nilai spiritual dan administrasi pemerintahan. Namun, potensi ini sering kali terabaikan, di mana program pemerintah lebih banyak terfokus pada pembangunan fisik ketimbang pembentukan karakter masyarakat. Lebih jauh lagi, gaya hidup beberapa

pemimpin lembang yang bertentangan dengan prinsip kesederhanaan dan kasih telah mencoreng kredibilitas tata kelola pemerintahan. Penyalahgunaan wewenang, seperti praktik korupsi dan gaya hidup mewah, menjadi contoh nyata dari penyimpangan nilai-nilai inti kepemimpinan Kristen. Padahal, sebagaimana dinyatakan oleh Bonhoeffer, seorang pemimpin yang bertanggung jawab moral memiliki kewajiban untuk menegakkan keadilan dan kebenaran, bahkan di tengah tekanan atau godaan untuk menyimpang.

Penerapan nilai-nilai kepemimpinan Kristen juga dapat memberikan solusi terhadap tantangan transparansi dan akuntabilitas yang masih dihadapi pemerintahan lembang. Sebagai contoh, alokasi dana lembang di Kabupaten Toraja Utara pada tahun 2023 — yang mencakup Rp 994.162.000 dari APBN dan Rp 394.843.000 dari APBD — memiliki potensi besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan yang berbasis pada keadilan dan efisiensi. Dengan melibatkan tokoh agama dan masyarakat secara aktif, pemerintah dapat memastikan bahwa penggunaan dana tidak hanya tepat sasaran tetapi juga mencerminkan nilai-nilai kasih dan tanggung jawab sosial. Sebagai penutup, kepemimpinan Kristen menekankan bahwa pelayanan adalah inti dari setiap bentuk otoritas. Yesus dalam Matius 20:25-28 mengajarkan bahwa kepemimpinan yang sejati adalah melayani, bukan mendominasi. Ketika nilai-nilai ini diterapkan secara konsisten, tata kelola lembang dapat berkembang menjadi sistem yang tidak hanya efektif secara administratif, tetapi juga bermakna secara sosial, menciptakan pemerintahan yang adil, inklusif, dan berkelanjutan.

B. Identifikasi Masalah

Penelitian ini berfokus pada penerapan prinsip-prinsip kepemimpinan Kristen dalam pengelolaan dana desa di Kecamatan Rantebua, Kabupaten Toraja Utara, yang merupakan aspek penting dalam konteks kepemimpinan Kristen. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa. Penulis mengkaji bagaimana seorang pemimpin Kristen dapat memastikan bahwa akuntabilitas tidak hanya terwujud dalam pelaporan informasi, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai etika dan moral Kristen dalam setiap proses pengambilan keputusan

C. Batasan Masalah

1. Penelitian ini akan terpusat pada daerah Kecamatan Rantebua, Kabupaten Toraja Utara.
2. Penelitian ini akan mengintegrasikan perspektif teologis Kristen dalam memahami kepemimpinan dan pengelolaan sumber daya, dengan fokus pada ajaran dan nilai-nilai Kristen yang dapat mempengaruhi praktik kepemimpinan serta meningkatkan pengelolaan dana desa.
3. Fokus penelitian ini akan terbatas pada kajian terhadap strategi dan praktik kepemimpinan yang diterapkan oleh pemimpin Kristen di pemerintahan desa, termasuk dalam aspek-aspek seperti komunikasi yang transparan, keterlibatan masyarakat, akuntabilitas, dan integritas dalam pengelolaan dana desa.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian masalah yang disampaikan dalam latar belakang dan fokus penelitian yang telah ditetapkan, penulis merumuskan beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Sejauh mana akuntabilitas dan kepercayaan dalam tata kelola penggunaan dana desa meningkat melalui praktik kepemimpinan Kristen?
2. Bagaimana prinsip-prinsip kepemimpinan Kristen memengaruhi kebijakan dan keputusan di tingkat kepemimpinan Kepala Desa atau Lembang?

E. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaruh kepemimpinan Kristen terhadap pengelolaan dana lembang, dengan fokus pada penerapan prinsip transparansi, partisipasi, dan inklusivitas dalam setiap tahap pengelolaan. Penelitian ini juga berusaha mengidentifikasi peran Badan Permusyawaratan Lembang (BPL) sebagai jembatan antara kebutuhan masyarakat dan kebijakan pemerintah, serta tantangan yang dihadapi dalam implementasi tata kelola yang efektif.

1. Menyoroti nilai-nilai seperti keadilan dan tanggung jawab yang mendukung transparansi dan partisipasi aktif masyarakat dalam setiap tahapan pengelolaan dana.
2. Memberikan rekomendasi untuk memperkuat kapasitas kelembagaan dan meningkatkan efektivitas komunikasi antara pemerintah dan masyarakat demi terciptanya tata kelola yang lebih adil dan berkelanjutan.

F. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini merupakan salah satu langkah dalam menyelesaikan pendidikan Pasca Sarjana Strata Dua (S2) di Institut Agama Kristen Negeri Toraja.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran terhadap perkembangan ilmu pengetahuan di IAKN Toraja serta menjadi referensi penting bagi mahasiswa, khususnya dalam program studi Kepemimpinan Kristen. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan wawasan mengenai penerapan prinsip-prinsip kepemimpinan Kristen dalam pengelolaan dana desa, serta dalam mengatasi masalah terkait pengambilan keputusan dan penggunaan dana desa.

2. Manfaat Praktis

- a. Membantu pemimpin untuk memahami perannya sebagai pelayan masyarakat, bukan sebagai penguasa yang dominan.
- b. Menjamin bahwa penggunaan dana desa difokuskan pada proyek-proyek yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat luas, bukan hanya untuk kepentingan kelompok tertentu.
- c. Memastikan bahwa pengelolaan dana desa dilakukan dengan integritas dan kejujuran tinggi, tanpa terjadinya penyalahgunaan atau korupsi, serta sesuai dengan regulasi yang berlaku, melalui proses yang transparan dan adil.

- d. Sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah khususnya Pemda Toraja Utara untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana desa.

